

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa Cibiru Wetan berada di wilayah administratif Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas total sekitar 3,25 kilometer persegi. Secara letak geografis, desa ini berada pada koordinat 10763337 Bujur Timur dan -69632 Lintang Selatan. Berdasarkan kondisi topografi, sebagian besar area di luar kawasan hutan merupakan dataran tinggi dengan elevasi mencapai lebih dari 787 meter di atas permukaan laut (MDPL), serta menunjukkan variasi ketinggian yang cukup beragam. (Observasi, Kamis, 05-12-2024).

Pemerintahan Desa Cibiru Wetan memiliki peran penting dalam merancang serta melaksanakan pembangunan yang efektif dan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh perangkat desa. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada aparat desa semata, melainkan juga memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Partisipasi tersebut perlu dihargai agar tercipta kolaborasi yang harmonis antara pemerintah desa dan warga. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Desa Cibiru Wetan mencapai 19.370 jiwa, dengan komposisi 9.742 orang laki-laki dan 9.628 orang perempuan. (<https://cibiruwetan.desa.id/artikel/2016/8/27/wilayah-desa>).

Penduduk Desa Cibiru Wetan memiliki beragam mata pencaharian yang menjadi sumber penghasilan utama guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, pada tahun 2019, pandemi global COVID-19 membawa dampak besar

terhadap sektor ekonomi, termasuk di wilayah ini. Krisis tersebut menyebabkan lonjakan angka pengangguran karena banyak perusahaan yang harus menghentikan operasionalnya, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan hingga mengalami kebangkrutan. Berbagai sektor industri mengalami kesulitan untuk tetap bertahan akibat pembatasan kegiatan masyarakat, menurunnya tingkat konsumsi, serta kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dampak dari kondisi tersebut sangat dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka. Tak hanya berimbas pada stabilitas ekonomi individu dan keluarga, situasi ini juga menimbulkan implikasi sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kemiskinan serta kesulitan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak nyata bagi warga Desa Cibiru Wetan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi menyebabkan banyak warga kehilangan sumber penghasilan utama, sehingga kesulitan dalam mencukupi kebutuhan pokok harian. Situasi ini turut meningkatkan angka pengangguran di lingkungan desa, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta memperparah kondisi kemiskinan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, aparatur pemerintahan desa mengambil peran strategis dalam menyusun dan mengimplementasikan program pembangunan yang bersifat solutif. Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, Desa Cibiru Wetan menyelenggarakan sebuah program yang merupakan mandat langsung dari pemerintah pusat, yaitu kegiatan Padat Karya

Tunai (PKT). Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi lokal serta meningkatkan taraf hidup warga desa secara menyeluruh.

Acep Deni Sopian selaku Kasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa program Padat Karya Tunai bukanlah inisiatif yang berasal dari pemerintah desa, melainkan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Program tersebut didanai melalui Dana Desa dan pelaksanaannya menjadi kewajiban yang harus diakomodasi oleh desa. Di Desa Cibiru Wetan, implementasi program ini dilakukan dalam dua periode waktu yang berbeda, yaitu tahap pertama berlangsung pada tahun 2022 dan tahap kedua dilanjutkan pada tahun 2023. Pelaksanaan program ini tidak dilakukan pada tahun 2024, namun dijadwalkan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2025. Sebelum kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) dimulai, pihak pemerintah desa terlebih dahulu mengundang seluruh Ketua Rukun RT untuk menyampaikan informasi terkait rencana pelaksanaannya. Melalui proses ini, masing-masing RT diberi kesempatan untuk mendata warga yang dinilai kurang mampu. (Wawancara dengan Acep Deni Sopian {Kasi Pemerintahan Cibiru Wetan}, Kamis, 05-12-2024).

Pelaksanaan program PKT di Desa Cibiru Wetan dirancang agar dapat diikuti oleh baik laki-laki maupun perempuan. Program Padat Karya Tunai (PKT) pada awalnya dirancang sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19, dengan tujuan utama menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan akibat krisis tersebut. Meskipun situasi pandemi kini telah mereda, pelaksanaan program ini tetap dilanjutkan dengan fokus yang bergeser, yakni memprioritaskan individu yang mengalami pengangguran maupun berada dalam

kondisi ekonomi tidak mampu. (Wawancara dengan Acep Deni Sopian {Kasi Pemerintahan Cibiru Wetan}, Kamis, 05-12-2024).

Pada tahap awal pelaksanaan program *Cash for Work* atau Padat Karya Tunai (PKT), sekitar 200 peserta dilibatkan. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memberikan kesempatan kerja kepada warga yang kehilangan pekerjaan dan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa pandemi Covid-19. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pertama program ini mencakup aksi pembersihan aliran sungai di bagian hilir wilayah Desa Cibiru Wetan. Di samping itu, warga juga terlibat dalam pengelolaan sampah dengan sistem kerja bakti, membersihkan area yang berada di bagian hulu desa. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan dalam bentuk kerja padat karya, di mana setiap partisipan mendapatkan upah atas kontribusinya. (Sopian, 2025). (Wawancara, Kamis 05 Februari 2024).

Pelaksanaan tahap kedua program Padat Karya Tunai, peran utama diambil alih oleh Kelompok Wanita Tani (KWT). Para anggota kelompok, yang seluruhnya terdiri dari perempuan petani, menunjukkan komitmen mereka untuk terlibat aktif serta menerima kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Kegiatan dalam program ini difokuskan pada upaya pelestarian lingkungan, seperti pembersihan area kebun atau lahan pertanian. Di sisi lain, KWT secara mandiri mengelola kegiatan pertanian dengan menanam berbagai jenis sayuran seperti selada, sosin, dan bok choy sebagai bagian dari kontribusi produktif mereka terhadap ketahanan pangan lokal. (Sopian, 2025). (Wawancara, Kamis 05 Februari 2024).

Sebelum mengimplementasikan program Padat Karya Tunai (*Cash for Work*), Pemerintah Desa Cibiru Wetan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap situasi

kedaruratan yang dihadapi serta langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan. Prosedur pelaksanaan program dirancang dengan memperhatikan jenis pekerjaan yang perlu diselesaikan, sehingga dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan yang fleksibel. Selain itu, perencanaan dilakukan secara sistematis dengan menentukan jumlah tenaga kerja yang dilibatkan secara bergantian, serta pembagian tugas yang terstruktur untuk setiap individu yang terlibat. Tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya Program Padat Karya berada di bawah koordinasi Panitia Pelaksana Kegiatan Desa (PKD). Di samping itu, pelibatan sejumlah unsur masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa (BumDesa), Karang Taruna, serta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). (Wawancara, 2024).

Sebelum proses pembayaran upah kepada para pekerja dilakukan, pihak desa terlebih dahulu menetapkan besaran alokasi anggaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Sebagai ilustrasi, apabila total anggaran yang tersedia berjumlah satu juta rupiah, maka sebesar 30% dari nominal tersebut wajib dialokasikan secara khusus dan tidak dapat dialihkan untuk keperluan lain. Dana sebesar 30% ini harus dipecah ke dalam beberapa hari pelaksanaan serta disesuaikan dengan jumlah peserta yang terlibat, sehingga pembayaran upah dapat dilakukan secara harian berdasarkan sistem Hari Orang Kerja (HOK). (Wawancara, 2024).

Pembayaran bagi peserta Padat Karya Tunai di Desa Cibiru Wetan, diberikan secara harian namun apabila tidak bisa secara harian, maka pembayaran dilakukan

secara mingguan. Peserta Padat Karya Tunai akan menerima upah lebih kurang sebesar Rp120.000. Pembayaran dilakukan dengan melihat daftar hadir peserta yang hadir pada hari dilaksanakannya Padat Karya Tunai. Pemabayaran upah tersebut akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Peserta Padat Karya Tunai ini bekerja selama lebih kurang 8 jam sesuai dengan HOK (Harian Orag Kerja). Upah yang diterima oleh peserta Padat Karya Tunai membantu dalam memenuhi kebutuhan harian, tetapi jika dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga yang tinggi, maka jumlah upah tersebut masih menjadi tantangan dalam membantu memenuhi kebutuhan permasalahan ekonomi warga secara berkelanjutan. (Wawancara, 2024).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan otoritas serta kapasitas untuk mengelola dan memantau penggunaan anggarannya secara mandiri. Pemberian kewenangan ini mendorong peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada desa yang terus berlangsung sejak tahun 2015. Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan urusan desa telah menetapkan sejumlah kebijakan yang terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Regulasi-regulasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan berbagai program strategis yang bertujuan mendukung realisasi visi NAWACITA yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Dahliati, dkk. 2020).

Secara esensial, pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh warga negara, yang secara langsung maupun tidak langsung

menyentuh setiap lapisan masyarakat. Untuk merealisasikan sasaran tersebut, pembangunan dilakukan melalui pendekatan yang sistematis serta mencakup berbagai dimensi kehidupan. (Sondakh, dkk. 2021). Agar masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang memadai dan kesejahteraan sosial dapat tercapai, diperlukan peran aktif pemerintah dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan ketepatan sasaran. (Widhiasthini & Kurnia, 2021).

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan transformasi kesejahteraan sosial, peningkatan taraf hidup masyarakat desa merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sedangkan kegagalan dalam aspek ekonomi justru dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial dan memperburuk kesenjangan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan dipandang sebagai suatu kondisi yang merefleksikan kualitas hidup masyarakat, yang dapat diukur melalui tingkat penghidupan yang mereka capai. (Karmeta, 2019).

Kondisi kesejahteraan di lingkungan pedesaan dapat diartikan sebagai situasi yang mencakup berbagai aspek penting, seperti terciptanya rasa aman dan ketenteraman di kalangan masyarakat, tersedianya infrastruktur publik yang mendukung aktivitas ekonomi warga, peningkatan pendapatan per kapita yang berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan, serta kemudahan dalam memperoleh dan mengakses informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Soetomo (2014) dalam (Ratih, 2020). Menurut Soetomo (2014), kesejahteraan dapat diukur melalui tiga dimensi utama. Pertama, aspek keadilan sosial, yang

meliputi indikator seperti tingkat pendidikan, kualitas layanan kesehatan, ketersediaan akses terhadap air bersih dan listrik, serta proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Kedua, dimensi keadilan ekonomi, yang dinilai melalui pendapatan masyarakat, kepemilikan tempat tinggal, dan tingkat konsumsi atau pengeluaran. Ketiga, keadilan dalam konteks demokrasi, yang mencakup perasaan aman dalam kehidupan sehari-hari serta kemudahan dalam memperoleh informasi.

Apabila individu, kelompok, atau keluarga tidak mampu mencapai taraf hidup yang layak sebagaimana indikator kesejahteraan, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai kemiskinan. Di negara-negara berkembang, fenomena kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang dialami oleh sebagian besar penduduk, di mana upaya penanggulangannya cenderung berjalan lambat dan sering kali menunjukkan perkembangan yang stagnan. Indra Putra dan Lisna (2020) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dikenali melalui beberapa indikator, seperti meningkatnya angka pengangguran, keterisolasian sosial, serta kondisi ketertinggalan. Keadaan ini pada akhirnya memunculkan kesenjangan antara kelompok masyarakat, antar sektor ekonomi, maupun antar wilayah. Jika pihak pembuat kebijakan tidak mampu mengembangkan strategi pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat miskin, maka kelompok ini berpotensi tetap terjebak dalam kondisi kemiskinan tersebut. (Triani, dkk. 2020).

Di Indonesia, kemiskinan diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu kemiskinan yang terjadi di wilayah perkotaan dan kemiskinan di daerah pedesaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di kawasan pedesaan mencapai 13,58 juta orang, atau

sekitar 11,79% dari keseluruhan populasi. Sementara itu, di wilayah perkotaan, jumlahnya mencapai 11,64 juta jiwa atau setara dengan 7,09% dari total penduduk.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta menanggulangi kemiskinan, telah diterbitkan sebuah keputusan bersama oleh empat menteri. Keputusan tersebut mencakup Menteri Dalam Negeri (Nomor 140-8698 Tahun 2017), Menteri Keuangan (Nomor 954/KMK.07/2017), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Nomor 116 Tahun 2017), serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017). Inti dari kesepakatan ini adalah sinkronisasi dan penguatan arah kebijakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan fokus utama pada pelaksanaan program Padat Karya Tunai. Program Padat Karya Tunai di Desa (PKT Desa) dirancang untuk menanggulangi kemiskinan, menambah penghasilan masyarakat, serta menurunkan prevalensi stunting.

Kelompok sasaran dari program Tunai untuk Kerja (*Cash For Work*) mencakup beberapa kategori, antara lain: (1) individu yang tidak memiliki pekerjaan, baik laki-laki maupun perempuan dewasa, yang saat ini sedang tidak bekerja, telah kehilangan pekerjaan sebelumnya, dan sedang aktif mencari lapangan kerja; (2) pekerja paruh waktu atau setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, termasuk para petani yang belum memasuki musim tanam atau panen dan mengalami kekurangan pangan; (3) masyarakat miskin, yaitu mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan

berada di bawah ambang batas kemiskinan; serta (4) keluarga dengan anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi, yang masuk dalam kategori masyarakat rentan secara kesehatan dan ekonomi.

Program Padat Karya Tunai atau *Cash for Work* dijalankan berdasarkan sejumlah prinsip utama. Pertama, prinsip inklusivitas yang berarti pelibatan aktif dari kelompok masyarakat rentan seperti warga miskin, komunitas marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh keagamaan dalam pelaksanaan kegiatan. Kedua, prinsip partisipatif yang menekankan bahwa seluruh proses program berasal dari, dijalankan oleh, dan diperuntukkan bagi warga desa sendiri, dengan menjunjung tinggi nilai gotong royong yang disepakati melalui forum musyawarah desa. Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menekankan pentingnya kegiatan yang tidak hanya berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa, tetapi juga mendukung pengelolaan, pemeliharaan, dan keberlanjutan sumber daya secara terbuka dan bertanggung jawab.

Berbagai bentuk kegiatan dalam program Padat Karya Tunai difokuskan pada dua bidang utama. Pertama, pembangunan serta pemulihan infrastruktur desa yang tercantum dalam kewenangan desa, seperti perbaikan irigasi dan saluran sungai, pembangunan maupun rehabilitasi jalan serta jembatan antarwilayah desa, dan pembangunan tambatan perahu. Kedua, optimalisasi pemanfaatan lahan untuk meningkatkan hasil produksi, baik di area pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Ketiga, Berbagai kegiatan produktif lainnya mencakup pengembangan serta peningkatan kapasitas desa wisata, penguatan sektor ekonomi kreatif, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui stimulasi

kewirausahaan. Keempat, aspek pemberdayaan masyarakat meliputi upaya pengelolaan sampah dan air limbah, penataan lingkungan kawasan permukiman, pemanfaatan sumber energi terbarukan, hingga penyediaan serta distribusi makanan tambahan bagi anak-anak, khususnya bayi dan balita. Kelima, kegiatan pendukung lainnya mencakup aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi, namun berperan penting dalam menunjang kelancaran serta keberhasilan proses tersebut.

Pelaksanaan program Padat Karya dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan langsung masyarakat desa sebagai tenaga kerja utama (Pedoman Umum Pelaksanaan PKT Desa, 2018). Secara operasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan panduan teknis yang menjadi acuan dalam pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Padat Karya pada tahun 2018. Berdasarkan ketentuan dalam salah satu pedoman teknis, paling tidak 30% dari total anggaran dana desa untuk proyek pembangunan wajib dialokasikan khusus untuk membiayai tenaga kerja. Perhitungan upah mengacu pada sistem Hari Orang Kerja (HOK), yaitu delapan jam kerja per hari, sebagai dasar untuk menetapkan persentase pembayaran tersebut. Proses pembayaran upah dilakukan setiap hari, namun jika kondisi tidak memungkinkan, pembayaran dapat dilakukan secara mingguan.

Berdasarkan temuan yang ada, pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai terbagi ke dalam dua fase utama. Oleh karena itu, intervensi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat desa yang menjadi sasaran prioritas. Kendati program Padat Karya Tunai (PKT) dilaksanakan dalam dua tahap,

masih menjadi pertanyaan apakah implementasi tersebut benar-benar dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat desa, khususnya warga Desa Cibiru Wetan, dalam hal peningkatan kesejahteraan. Ataukah kondisi sosial ekonomi mereka justru akan tetap stagnan sebagaimana sebelum program ini dijalankan.

Berdasarkan hal ini, dirasa tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut dengan judul **“Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (*Participatory Action Research* di Desa Cibiru Wetan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penelitian ini memusatkan perhatian pada pelaksanaan Padat Karya Tunai, sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibiru Wetan. Untuk memperjelas arah penelitian, rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang relevan dengan fokus tersebut:

1. Bagaimana komunikasi dalam hal persepsi transmisi, konsistensi dan kejelasan dalam pengimplementasian padat karya tunai di Desa Cibiru Wetan?
2. Bagaimana sumber daya yang dipersepsikan dari perspektif sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan peralatan/sarana dalam pengimplementasian program padat karya tunai di Desa Cibiru Wetan?
3. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan pengimplementasian padat karya tunai di Desa Cibiru Wetan?

4. Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengimplementasian padat karya tunai di Desa Cibiru Wetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan Padat Karya Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cibiru Wetan, berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami komunikasi dalam hal transmisi, konsistensi, dan kejelasan dalam implementasi padat karya tunai di Desa Cibiru Wetan.
2. Untuk memahami sumber daya dalam hal sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan peralatan/sarana dalam implementasi padat karya tunai di Desa Cibiru Wetan.
3. Untuk memahami disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi padat karya tunai di Desa Cibiru Wetan.
4. Untuk memahami struktur birokrasi yang mendukung implementasi padat karya tunai di Desa Cibiru Wetan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangan pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam dalam mengembangkan beberapa

mata kuliah. Diantaranya, Riset Aksi berfokus pada keterlibatan langsung dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi dan evaluasi terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat melalui metode *Participatory Action Research*; Pengembangan Ekonomi Umat berfokus pada pemberdayaan ekonomi dengan pengimplementasian Padat Karya Tunai; Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan berfokus pada kebijakan dan partisipatif masyarakat sebagai subjek pembangunan serta sebagai sasaran dari implementasi program padat karya tunai; Komunikasi Pembangunan berfokus pada pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam membangun pemahaman Bersama serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui program padat karya tunai.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah Desa Cibiru Wetan dengan memberikan solusi atas berbagai tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat menentukan sejauh mana Padat Karya Tunai (PKT) mencapai tujuan-tujuan penting seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga akan mengukur dampak Padat Karya Tunai (PKT) terhadap kesejahteraan masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya, sehingga memberikan gambaran konkret tentang kontribusi program terhadap kesejahteraan masyarakat.

E. Landasan Pemikiran

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penelitian sebagai berikut:

1. Landasan Teoritis

a. Implementasi Kebijakan

Dalam model sistem implementasi kebijakan, terdapat beberapa elemen utama yang saling terkait. Pertama, kebijakan atau program yang hendak dijalankan menjadi inti dari implementasi tersebut. Kedua, terdapat kelompok penerima manfaat, yaitu masyarakat yang menjadi target utama dan diharapkan mengalami peningkatan kondisi atau perubahan positif dari pelaksanaan program. Ketiga, pelaksana kebijakan, baik berupa institusi maupun individu, memiliki tanggung jawab atas pengelolaan, pelaksanaan, serta pengawasan jalannya kebijakan tersebut. Keempat, seluruh proses ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar, termasuk faktor fisik, sosial, budaya, dan politik yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan Edward dan Emerson, keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama. Pertama, penyampaian informasi harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Kedua, informasi tersebut perlu disampaikan secara konsisten untuk menghindari interpretasi yang keliru. Ketiga, dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan menuntut ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah maupun mutu. Keempat, faktor penting lainnya mencakup adanya komitmen serta sikap positif dari para pelaksana kebijakan di tingkat birokrasi, yang harus didukung pula oleh struktur organisasi yang efektif, mencakup tata kelola kerja serta sistem administrasi yang tertata.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan regulasi sangat ditentukan oleh keterkaitan antarelemen variabel yang ada. Salah satu aspek kunci adalah komunikasi, yang mencerminkan bagaimana suatu kebijakan disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, faktor penentu lainnya mencakup sejauh mana sumber daya tersedia untuk mendukung proses implementasi, sikap dan reaksi para pelaku kebijakan, serta struktur kelembagaan yang menjalankan kebijakan tersebut. Di antara faktor-faktor tersebut, ketersediaan sumber daya, khususnya tenaga kerja yang kompeten, memegang peranan sentral dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Setiap individu memiliki sumber daya manusia yang mencakup unsur fisik maupun non-fisik, yang tercermin melalui kemampuan yang diperoleh dari pengalaman, keterampilan teknis, keahlian tertentu, serta jaringan relasi personal. Selain itu, informasi juga menjadi elemen krusial sebagai sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan regulasi. Peran informasi dalam konteks ini adalah untuk menyampaikan arah kebijakan sekaligus menjadi sarana pendukung dalam proses implementasi program secara efektif. Otoritas dalam konteks implementasi kebijakan merujuk pada hak untuk menentukan kebijakan, mengarahkan pelaksanaan, serta memberikan instruksi, yang beriringan dengan sikap dan dedikasi para pelaksana terhadap regulasi yang berlaku. Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana respons atau persepsi pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, struktur birokrasi menggambarkan sejauh mana kapasitas administratif mampu menjalankan kebijakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemampuan administrasi dalam melaksanakan kebijakan publik tercermin melalui

struktur birokrasi yang ada. Struktur ini menetapkan pembagian fungsi dan tanggung jawab secara sistematis, merinci kebijakan menjadi aktivitas-aktivitas teknis, serta menetapkan prosedur operasional yang harus diikuti dalam proses implementasi.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa istilah "implementasi" atau "aplikasi" tidak hanya menunjuk pada kegiatan semata, melainkan mencerminkan adanya proses tindakan yang terstruktur. Frasa "mekanisme suatu sistem" mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan sebuah proses yang disusun secara terencana dan dijalankan dengan kesungguhan, mengacu pada norma-norma tertentu guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Padat Karya Tunai (PKT)

Keputusan bersama empat menteri pada tahun 2017 yakni Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) menjadi dasar dalam upaya harmonisasi serta penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kebijakan ini, desa diwajibkan mengalokasikan minimal 30% dari total anggaran kegiatan pembangunan untuk membayar upah masyarakat sebagai bagian dari penciptaan lapangan kerja di desa. Penetapan besaran upah tersebut dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang).

Pelaksanaan program ini berlandaskan pada instruksi langsung Presiden Republik Indonesia yang disampaikan melalui Sekretariat Kementerian

Koordinator. Guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, memperkuat kesejahteraan warga, serta menjaga stabilitas daya beli masyarakat, pelaksanaan program padat karya berbasis Dana Desa ditujukan untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Penyerapan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembayaran upah secara tunai baik secara harian maupun mingguan. Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) berakar pada sejumlah gagasan utama, antara lain: (1) Prinsip inklusivitas, yang menekankan pentingnya melibatkan kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam kegiatan pemberdayaan; dan (2) Prinsip partisipatif, yang menggarisbawahi peran aktif masyarakat lokal dalam pelaksanaan program tersebut. (3) Prinsip transparansi menekankan pentingnya penerapan asas keterbukaan dalam seluruh tahapan dan tingkatan proses pemberdayaan tanpa pengecualian. (4) Asas efektivitas mengharuskan agar pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT) benar-benar memberikan dampak nyata yang berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (5) Prinsip swakelola menunjukkan bahwa tanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berada di tangan masyarakat desa itu sendiri, sebagai pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaannya. (Ariel, dkk 2023).

Program Padat Karya Tunai (PKT) juga memberikan manfaat tambahan berupa terbukanya peluang kerja bagi kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran. Kelompok ini meliputi: (1) individu yang tergolong miskin, tidak memiliki pekerjaan, berpendapatan rendah, serta keluarga yang memiliki balita yang mengalami kondisi stunting; (2) peningkatan keterlibatan masyarakat secara luas

guna menunjang perbaikan kualitas hidup mereka; dan (3) optimalisasi potensi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi mereka. Agar tujuan pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai secara optimal dan efektif, telah dirancang suatu pedoman pelaksanaan yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat sasaran dan para pemangku kebijakan. Kolaborasi ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang responsif, yakni dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam hal penentuan prioritas anggaran pembangunan. (Ir. Hendrawati Hamdi, 2018).

c. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kesejahteraan" berasal dari kata "sejahtera", yang dimaknai sebagai kondisi aman, tenteram, damai, dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman atau gangguan (Poerwadarminto, 1999). Dalam kajian etimologi, kata "sejahtera" memiliki akar dari bahasa Sanskerta, yakni "*catera*", yang berarti tajuk atau puncak. Dalam kerangka pemahaman tentang kesejahteraan, istilah "*catera*" menggambarkan kondisi seseorang yang mencapai taraf hidup yang layak, yakni terbebas dari belenggu kemiskinan, tekanan psikologis seperti stres dan kecemasan, serta keterbelakangan intelektual. Individu yang demikian berada dalam keadaan aman dan damai, baik secara jasmani maupun rohani. (Syahrin, dkk 2022). Kesejahteraan dapat dipahami sebagai suatu kondisi hidup yang dicirikan oleh rasa damai, perlindungan fisik dan mental, serta terbebas dari berbagai bentuk kesulitan seperti kemiskinan, rasa takut, maupun ketidaktahuan. (Ilyas, dkk 2024).

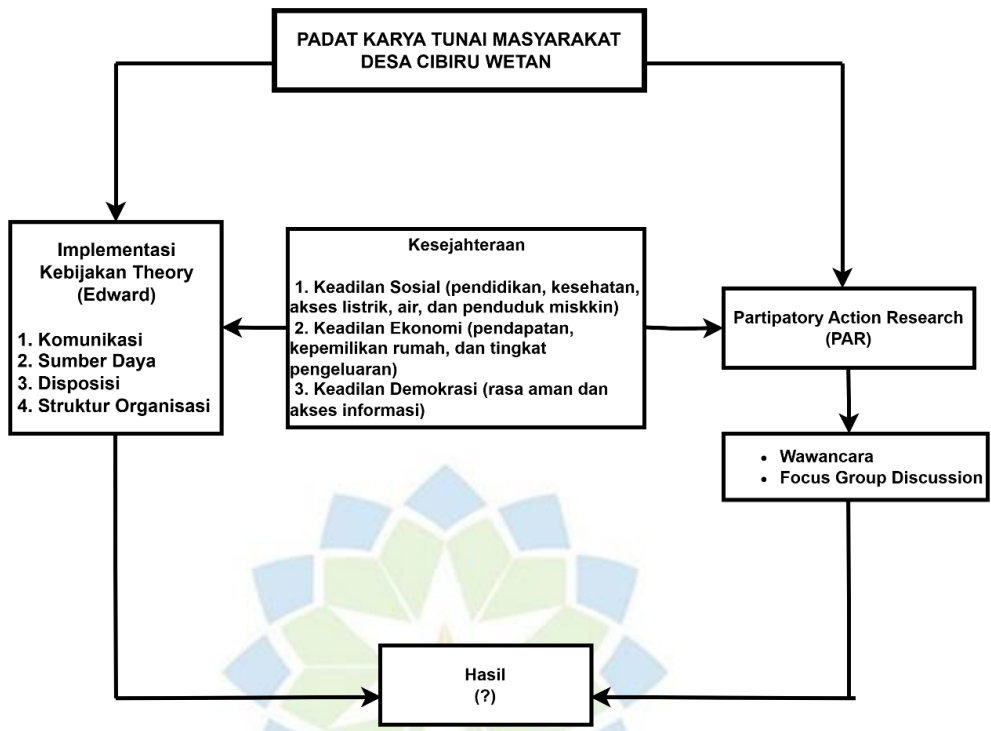
Kesejahteraan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu keadaan sosial di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, serta interaksi sosialnya. Dalam kondisi ini, harkat dan martabat manusia tetap terjaga, sehingga masyarakat mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan sosial yang muncul di lingkungan mereka. Menurut Dura (2016, hlm. 26), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat tercermin dari terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal yang memadai, ketersediaan makanan dan pakaian yang mencukupi, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Lebih dari itu, kesejahteraan juga diartikan sebagai situasi di mana individu dapat mengoptimalkan utilitas atau kepuasannya berdasarkan batas anggaran yang dimiliki, serta kondisi terpenuhinya kebutuhan baik secara fisik maupun spiritual.

Secara garis besar, masyarakat dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang hidup secara berkelompok. Secara etimologis, istilah "masyarakat" berasal dari kata Latin *socius*, yang mengandung makna "kawan" atau "rekan", dan menggambarkan pentingnya interaksi serta dinamika sosial dalam membentuk kebersamaan. Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata "masyarakat" diturunkan dari "*sharaka*", yang mengandung arti "terikat" dan "ikut berperan", menekankan adanya keterlibatan dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Menurut J.L. Gillin, masyarakat dapat dipahami sebagai himpunan individu yang tersebar namun memiliki kesamaan dalam hal adat, kebiasaan, pandangan hidup, serta rasa kebersamaan. Sementara itu, Mack dan Iver menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu tatanan yang tersusun dari berbagai metode, prosedur kerja, relasi

kewenangan, serta bentuk saling membantu antarkomponen sosial, yang di dalamnya mencakup berbagai kelompok dan lapisan sosial, sekaligus menjadi mekanisme dalam mengatur kebebasan dan perilaku manusia. Maclver dalam Harsojo (1999:127) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan sebuah tatanan sistematis yang mencakup pola-pola kerja, relasi kewenangan, serta bentuk saling membantu antarindividu dan kelompok sosial. Sistem ini juga mencakup mekanisme pengaturan terhadap perilaku manusia serta batas-batas kebebasan yang dimilikinya. (Suardi Wekke, dkk 2016)

Soekanto mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua tipe, yakni pedesaan dan perkotaan, berdasarkan sejumlah indikator seperti cara menjalankan kehidupan beragama, tingkat individualisme, struktur pembagian kerja, jenis-jenis profesi, pola pikir, gaya hidup, serta berbagai dinamika sosial lainnya. Komunitas di wilayah pedesaan umumnya ditandai dengan ikatan kekeluargaan yang erat, tradisi yang masih terjaga kuat, ruang lingkup pekerjaan yang relatif sempit, serta ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi alam dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Pada Penelitian "Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa" (PAR di Desa Cibiru Wetan)

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Secara garis besar, pelaksanaan penelitian ini difokuskan di wilayah Desa Cibiru Wetan. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan melalui pertimbangan dengan memperhatikan berbagai alasan rasional, yang mendasari desa ini dianggap layak dan relevan dijadikan sebagai tempat penelitian.

- a) Ketersediaan data yang mudah diakses dari berbagai sumber dan angka.

Desa Cibiru Wetan menerapkan program Padat Karya Tunai.

- b) Relevansi antara tiga poros pengembangan masyarakat Islam dan tujuan penelitian.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivisme. Menurut Neuman (2015: 115), pendekatan konstruktivis bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu peristiwa serta menjelaskan makna di balik aktivitas sosial yang terjadi. Oleh karena itu, studi ini diarahkan untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang selaras dengan karakteristik pendekatan konstruktivis. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan terhadap fenomena yang muncul secara alami. Proses pengumpulan data tidak bertumpu pada teori yang telah ada, melainkan diperoleh langsung dari realitas empiris selama interaksi di lapangan berlangsung.

3. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan, khususnya yang dikenal sebagai *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama anggota masyarakat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong perubahan yang bersifat transformatif, seperti perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Zaenal Mukarom dan Rohmanur Aziz (2023), riset aksi atau penelitian tindakan merupakan bentuk penelitian yang dilandasi oleh praktik nyata di lapangan, yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi serta merumuskan program yang relevan dengan kebutuhan lokal. Penekanan utama dari pendekatan ini adalah pada aspek pemberdayaan masyarakat. (Mukarom & Aziz, 2023).

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan pendampingan adalah melalui wawancara serta observasi, dengan mengadopsi metode *Participatory Action Research* (PAR) sebagaimana dijelaskan oleh Afandi dan rekan-rekannya (2022). Pendekatan PAR semakin banyak diadopsi dan dikembangkan, baik oleh berbagai universitas dan institusi internasional, maupun oleh organisasi-organisasi berbasis komunitas. (Iman, dkk 2024).

Participatory Action Research (PAR) atau penelitian tindakan partisipatif merupakan suatu pendekatan riset yang bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan secara kolaboratif dan memanfaatkan data yang diperoleh guna merumuskan langkah-langkah penyelesaian. Dalam praktiknya, PAR bukanlah penelitian yang dilakukan terhadap subjek, melainkan riset yang dilaksanakan oleh komunitas, bersama mereka, dan untuk kepentingan mereka sendiri. (Rahmat & Mirnawati, 2020). Dalam *Participatory Action Research* terdapat komponen siklus 1 *to know* (untuk mengetahui), Siklus 2 *to understand* (untuk memahami), Siklus 3 *to plan* (untuk merencanakan), siklus 4 *to action* (untuk melaksanakan), siklus 5 *to reflection* (refleksi).

4. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai implementasi program Padat Karya Tunai yang diselenggarakan oleh pemerintah desa melalui kerja sama dengan masyarakat setempat. Selain itu, data juga mencakup berbagai hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan program serta strategi penyelesaiannya. Di samping itu, data yang dikaji juga mencerminkan

sejauh mana program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf kesejahteraan warga desa.

5. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah dua kategori sumber data.

1) Data primer

Menurut Umi Narimawati (2008:98), data primer merupakan bentuk informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan dari individu atau pihak yang menjadi objek penelitian, yang secara langsung memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Adapun sumber utama data ini meliputi aparat pemerintahan desa serta warga yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT). Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2006:132), informan merupakan individu yang berperan dalam menyampaikan data serta informasi terkait situasi dan kondisi tempat dilaksanakannya penelitian. Sugiyono (2009:96) mengemukakan bahwa purposive sampling adalah metode penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dan selektif. Dalam konteks penelitian ini, pihak-pihak yang dijadikan sumber data adalah aparatur desa serta masyarakat yang turut andil dalam pelaksanaan program padat karya tunai.

2) Data sekunder

Data sekunder didefinisikan sebagai "sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul" (Sugiyono, 2008: 402). Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari buku, laporan Badan Pusat

Statistik, dokumen resmi pemerintah desa, publikasi ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan penelitian program Padat Karya Tunai.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat desa sebagai hasil dari pelaksanaan dan penerapan program Padat Karya Tunai (PKT) yang berlangsung di Desa Cibiru Wetan. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini memanfaatkan berbagai media pencatatan visual, seperti buku catatan lapangan, alat perekam suara (tape recorder), dan kamera digital. Seluruh perangkat tersebut berfungsi untuk merekam dan mendokumentasikan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan implementasi Program Padat Karya Tunai oleh Pemerintah Desa Cibiru Wetan, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan warga desa.

b. Wawancara

Proses wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan informasi untuk mendalami isu-isu yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa dalam konteks pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT). Wawancara ini dilakukan baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka maupun secara tidak langsung menggunakan media komunikasi jarak jauh, seperti sambungan telepon, guna memperoleh klarifikasi terhadap poin-poin yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sesi wawancara dengan aparaturnya desa serta warga Desa Cibiru Wetan guna menggali informasi mengenai sejauh mana

pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT) memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat setempat.

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD), yang juga dikenal sebagai diskusi kelompok terarah, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang mengandalkan interaksi dalam kelompok melalui sesi tanya jawab dan percakapan terfokus. Pendekatan ini menjadi salah satu instrumen utama dalam metode *Participatory Action Research* (PAR), dengan menggunakan seperangkat alat bantu dan materi yang sering diterapkan dalam pelaksanaan penelitian partisipatif. Irwanto (1988: 5) menjelaskan bahwa *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan suatu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi kelompok, dengan fokus pada isu atau topik tertentu yang bersifat sangat spesifik.

d. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, studi literatur dimanfaatkan sebagai metode untuk menelusuri berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program Padat Karya Tunai. Data yang dikaji mencakup dokumen tertulis, arsip, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber informasi lain yang dinilai relevan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi program tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Cibiru Wetan.

e. Teknik Analisis Data

Proses analisis data mencakup kegiatan menelaah serta menata data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan secara

terstruktur. Data tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, dipecah menjadi bagian-bagian kecil, disintesis, serta disusun dalam pola tertentu. Langkah selanjutnya adalah menentukan informasi yang relevan dan layak untuk ditelaah lebih lanjut, hingga akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan yang mudah dipahami, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pembaca lainnya. (Sugiyono, 2016: 244). Menurut M.B. Miles dan A.M. Huberman (1998: 21–23), tahapan dalam analisis data kualitatif terdiri atas tiga proses utama, yakni tahap penyusutan data (data reduction), penyajian informasi (data display), serta penarikan kesimpulan yang disertai dengan proses verifikasi. Ketiga unsur ini saling berkaitan dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan.

1) Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada tahapan awal dalam proses analisis yang berfungsi untuk menyaring, merangkum, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara menyeleksi serta mengorganisasi catatan hasil observasi secara sistematis, sehingga mampu menyoroti aspek-aspek utama yang relevan dan membantu dalam mengidentifikasi pola atau tema sentral dari isu yang diteliti. Informasi yang diperoleh dari kegiatan lapangan kemudian dihimpun dan disusun dalam bentuk narasi deskriptif secara rinci. Narasi tersebut selanjutnya mengalami proses penyaringan, penggabungan, dan pemilahan, dengan menitikberatkan pada inti sari informasi yang paling relevan. Proses ini bertujuan untuk memusatkan perhatian pada isu-isu utama serta mengeksplorasi kecenderungan atau tema-tema yang muncul dari data tersebut.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting dalam menampilkan informasi secara terstruktur dan menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menarik simpulan maupun merumuskan tindakan selanjutnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, bentuk penyajian data yang umum digunakan adalah uraian naratif.

3) Penarikan Kesimpulan

Secara umum, pendekatan kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk memahami fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan secara mendalam, melalui pencatatan yang sistematis atau pengenalan pola serta susunan yang terorganisir. Data yang diperoleh dianalisis secara cermat dengan sikap terbuka namun tetap kritis, hingga diperoleh simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses validasi terhadap hasil dilakukan secara terus-menerus guna memastikan akurasi dan kredibilitas temuan.

